

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2014 – 2015

Yudhi Lestanata, Ulung Pribadi

Program Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: yudhieselotho@yahoo.co.id

Abstrak-Sistem pembangunan yang Bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas masyarakat memiliki daya tahan yang kuat ketika tertimpa persoalan. Program PBRT adalah instrumen untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan ekonomi, sosial, politik dan budaya sekaligus merupakan sarana transformasi sosial yang diharapkan mampu untuk mendongkrak keterpurukan situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang selama ini. Inovasi ini cukup menarik dan unik, karena merupakan satu-satunya model pembangunan yang ada di provinsi NTB bahkan di Indonesia. Sebagai ruisan masalah dari latar belakang yaitu 1. Bagaimana Efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 - 2015? dan 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga tahun 2014 - 2015? Pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Program Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Program pembangunan berbasis Rukun Tetangga yang menjadi program unggulan dan program percontohan Kabupaten Sumbawa Barat tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan. Dari data hasil temuan dilapangan selama penulis meneliti dapat melihat bahwa program ini salah satu inovasi penting Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendongkrak keberhasilan dalam pembangunan dengan ditetapkan Program ini, namun tidak seperti inovasi dan harapan dalam peraturan karena dalam perjalanan ternyata program ini tidak berjalan efektif. Banyak sumberdaya yang ada yang tidak di manfaatkan. penulis berharap supaya program ini tetap ada dan di bangkitkan kembali semangat para aktor pembangunan dalam memaksimalkan program PBRT ini.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengembangan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu, pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam menyelenggarakan pembangunan daerah berdasarkan prioritas tersebut. Dengan demikian diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang senyatanya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut maka pemerintah kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui perda no 27 tahun 2008 tentang Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, ingin melakukan terobosan yang selama ini tidak pernah terfikirkan oleh daerah lain bahwa jika ingin membangun basis yang kuat dalam pembangunan harus dimulai dari bawah. Pembangunan Berbasis RT (Rukun Tetangga) adalah pembangunan yang meletakkan lokus pembangunan di tingkat RT dan ketua RT bersama warga setempat yang merupakan unit komunitas terkecil (*grass root*) sebagai basis, sekaligus pelaku utama pembangunan, yang merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. (munirsampir. Blogspot : diakses tanggal 3 maret 2015). Instrument partisipasi ditempatkan sebagai kekuatan utama dalam pembangunan berbasis RT, karena memang pembangunan itu sesungguhnya berasal dari, oleh dan untuk masyarakat.

PBRT adalah merupakan program prioritas sekaligus unggulan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan telah menjadi wacana dan diskursus yang menarik dari berbagai kalangan, bukan hanya warga masyarakat di

KSB, melainkan pula dari Kabupaten/Kota lainnya di NTB, dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan program ini secara umum adalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada disetiap lingkungan RT melalui proses pemberdayaan dan penguatan warga desa dan RT. Semangat yang melatar belakangi RT sebagai basis pembangunan dilator belakangi oleh sejarah, kedudukan, peran dan fungsi RT selama ini. RT merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga, posisi RT sebagai pondasi sekaligus ujung tombak dalam proses pembangunan.

Kedudukan dan peran RT yang strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat telah dijadikan sebagai sarana atau salah satu instrumen penting bagi Penjahaj jepang melakukan proses pembodohan masyarakat dan mampu mempertahankan keamanan lingkungan. Melalui keberadaan dan peran RT pula, pemerintah orde baru berhasil mempertahankan dan memenangkan pemilu dari orde ke orde, dari RT ini pula kita bisa menyaksikan bagaimana prakarsa gotong royong dan swadaya masyarakat yang murni itu terbangun dan fakta-fakta lainnya. Fungsi dan peran RT di indonesia sesungguhnya sangatlah strategis dan potensial dalam rangka mendorong sebuah proses perubahan sosial, ekonomi bahkan politik dan keamanan lingkungan. Kemana arah kebijakan dan perubahan yang akan dicapai atau dituju dari kedudukan dan peran RT yang strategis tersebut. Semuanya itu akan sangat tergantung dari sejauh mana pemerintah daerah menempatkan posisi dan peran RT, serta bagaimana kehendak masyarakat terhadap peran dan fungsi RT saat ini.

Beberapa tahapan proses pelaksanaan proses pembangunan berbasis RT di tingkat RT

1. Sosialisasi. Sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan PBRT, pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya PBRT.
2. Pemetaan sosial (menyusun gambaran umum keadaan warga di lingkungan RT) pemetaan sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk: memperoleh gambaran tentang keadaan setiap warga, memahami nilai-nilai, sikap dan sejarah perkembangan warga setempat, serta memahami para aktor (warga) yang ada di lingkungan itu.
3. Mengidentifikasi masalah dan harapan warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi di lingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah.

Dalam meningkatkan partisipasi semua warga, telah dilakukan penguatan kelembagaan melalui penambahan jumlah lembaga RT, yaitu sebanyak 612 RT pada tahun 2006, meningkat menjadi 622 RT pada tahun 2007 dan pada tahun ini telah meningkat

menjadi 695 RT. (sumbawabaratkab.go.id diakses tanggal 18 maret 2015)

Sistem pembangunan yang Bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas masyarakat memiliki daya tahan yang kuat ketika tertimpa persoalan. Semua persoalan akan terjawab dengan peran serta aktif masyarakat di mana setiap mekanisme pembangunan dilalui dengan musyawarah warga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keswadayaan. Di samping itu, sistem pembangunan seperti PBRT akan mampu menutup celah terjadi penyelewengan kekuasaan karena program – program pembangunan direncanakan, diselenggarakan sekaligus diawasi (dievaluasi) oleh masyarakat secara langsung. (harian kobar, diakses tanggal 15 maret 2015)

Program PBRT adalah instrumen untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan ekonomi, sosial, politik dan budaya sekaligus merupakan sarana transformasi sosial yang diharapkan mampu untuk mendongkrak keterpurukan situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang selama ini. Inovasi ini cukup menarik dan unik, karena merupakan satu-satunya model pembangunan yang ada di provinsi ntb bahkan di indonesia. Namun, sejauh ini belum banyak upaya untuk melakukan kajian dan evaluasi secara mendalam mengenai perkembangan pelaksanaan PBRT, khususnya terkait capaian pelaksanaan keberhasilan, permasalahan yang berkembang maupun terkait dengan kekuatan dan kelemahan serta harapan-harapan masyarakat KSB dimasa mendatang atas PBRT. Selama 7 tahun berjalannya program ini baru beberapa orang yang melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda.

Ada beberapa masalah ditemukan dalam penelitian sebelumnya oleh Mustofa (2010) dari berbagai program yang dicanangkan pemerintah KSB seiring berjalannya program PBRT masih banyak kelemahan yang membuat masyarakat merasa kecewa karena program yang di unggulkan pemerintah KSB dan menjadi penyebab kabupeten tersebut mendapatkan berbagai penghargaan, namun masih belum berjalan sebagaimana harapan yang di inginkan. Dengan berbagai kelemahan yang dihadapi, supaya bisa menjadi bahan evaluasi untuk dapat di perbaiki kedepan dengan upaya program ini tetap menjadi program unggulan KSB dan tidak berhenti di tengah jalan.

Dari berbagai harapan masyarakat dengan keberadaan Program Pembangunan Berbasis RT, peneliti ingin mengetahui sejauh mana perkembangan program tersebut dalam proses implementasi sehingga peneliti berinisiatif melakukan analisis sejauh mana kebijakan PBRT dijalankan dan apa yang menjadi masalah selama program berjalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 - 2015?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga tahun 2014 - 2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk:

1. Menggambarkan dan menganalisa tentang efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 - 2015.
2. Menggambarkan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Kabupaten Sumbawa Barat.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Program Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat.

Seperti disampaikan Satori dan Komariah (2013:28) yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Langkah kerja mendeskripsikan suatu obyek fenomena, atau setting social terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk gambar atau angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

Oleh karena merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi. Mengacu pada pendapat Moleong (2014: 14-15), yang mengatakan pada dasarnya penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan

manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien:2006).

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, proses observasi dilakukan sebanyak dua (2) kali yakni observasi sebelum dan pada saat penelitian dilakukan. Observasi pra-penelitian dilakukan dengan tujuan mengamati situasi sejauh mana keefektifan kebijakan pemerintah terkait PBRT sebelum peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan beberapa informasi untuk menentukan variabel apa yang menarik untuk diteliti, sehingga peneliti memiliki gambaran dan kedalaman informasi mengenai obyek dan subyek penelitian seperti mengidentifikasi informen yang mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan serta mempelajari situasi dan kondisi obyek penelitian.

Sedangkan observasi pada saat penelitian dilakukan dengan metode observasi non-partisipan, yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian. Adapun hal-hal yang akan diamati antara lain terkait dengan Efektivitas Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara.

Dengan demikian Wawancara dilakukan pada orang-orang yang dianggap mengetahui tentang informasi yang sedang diteliti, proses wawancara dilakukan karena peneliti ingin memperoleh keterangan dari informan terkait dengan informasi apa saja yg dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*Dep-interview*), metode ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh informasi secara mendalam dengan orang-orang atau subyek penelitian yang telah ditetapkan melalui metode purposive sampling yang telah penulis paparkan sebelumnya. Adapun hal-hal yang akan diwawancarai adalah terkait dengan bagaimana Efektivitas pelaksanaan PBRT serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

b. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan Akademik.

1. Sebagai bahan kajian ilmiah tentang Program Pembangunan Berbasis RT.
2. Sebagai sumber data bagi peneliti berikutnya khususnya tentang data-data tentang Program Pembangunan Berbasis RT.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengevaluasi kebijakan Program Pembangunan Berbasis RT.
2. Sebagai bahan evaluasi dan kajian bagi semua *stakeholders* yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat terhadap efektivitas Program Pembangunan Berbasis RT.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bukanlah suatu kumpulan fakta dan perasaan tapi merupakan argumentasi runtut yang mengarah kepada penjelasan usulan penelitian. Dengan demikian kajian pustaka pada sebuah penelitian merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam membantu peneliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Masniadi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram dan David Kaluge Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya (2011) dengan judul *Implementasi Kebijakan Fiskal: Pembiayaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) di Kabupaten Sumbawa Barat*. Hasil penelitian : Program ini sedang diikhtirakan maksimal implementasinya dalam upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari hari ke hari secara berkelanjutan (*Konsep Sustainability Development UNDP MDGs Program*). Beberapa manfaat program PBRT antara lain: a) Lebih hidupnya kembali budaya gotong royong masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat yang dikenal dengan sebutan “*basiru*” yang sudah tumbuh dan berkembang sejak berabadabad yang lalu di tengah masyarakat Sumbawa Barat. b) Semakin terbukanya ruang dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh masyarakat di setiap RT. c) Semakin tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui wadah rembug/musyawarah warga yang melibatkan semua warga ditingkat Rukun Tetangga untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. d) Diterapkan manajemen terbuka yang memberikan akses kepada seluruh warga ditingkat RT untuk dapat memeriksa rencana kegiatan dan memeriksa bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan ditingkat RT termasuk pembangunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlokasi di RT.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Mustofa, SH.,MH, Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat Desa (2010) dengan judul *Menata Model Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)*. Hasil pembahasan 1.) langkah implementasi. Meski merupakan sebuah gagasan atau inovasi baru Pemerintah Daerah pada tahap awal Implementasi program Pembangunan Berbasis RT ternyata dilaksanakan pada seluruh wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan pendekatan secara bertahap meliputi; persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. 2). Target Capaian awal PBRT. Dari rencana peningkatan program yang telah disusun di atas, maka target capaian dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada penyiapan sosial, penguatan kelembagaan RT, dan optimalisasi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM). 3). Implementasi Persiapan dan awal PBRT. 4). Kemajuan Yang Dicapai pada awal PBRT. 5). Hambatan Dan Tantangan awal PBRT. Dari pembelajaran proses yang dilaksanakan pada awal pelaksanaan program PBRT ditemukan beberapa hambatan dan tantangan 6). Pembelajaran awal program PBRT. Pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan awal Program PBRT

E. Kerangka Teoritik

a. Efektivitas

efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Menurut Campbell J.P. (1970), Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokok atau mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell, 1970).

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan diteliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dalam mengukur efektivitas akan dilakukan dengan teliti karena tujuan program yang berobyek pada masyarakat sangat luas dan abstrak.

b. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1997), selain itu pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 1994).

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Menurut Arif Budiman (1996: 2) ada 4 cara mengukur pembangunan yaitu:

1. Kekayaan rata-rata

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti *pertumbuhan ekonomi*. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara negara tersebut setiap tahunnya.

2. Pemerataan

Segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki, atau yang diproduksi oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi, sebagian kecil orang didalam negara tersebut memiliki kekayaan melimpah, sedangkan sebagian besar penduduk didalam kemiskinan.

3. Kualitas kehidupan

Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolok ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*). Yang mengukur tiga indikator ,yakni: (1) rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun (2) rata-rata jumlah kematian bayi (3) rata-rata prosentasi buta dan melek huruf.

4. Kerusakan Lingkungan

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungannya

5. Keadilan Sosial Kesenambungan

Demikianlah, tolok ukur pembangunan yang berhasil, yang semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini

menjadi semaki kompleks. Dua faktor baru yang ditambahkan pada pembahasan di atas, yakni faktor keadilan sosial (pemerataan pendapatan) dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini, supaya bisa berlangsung terus secara berkesinambungan.

Teori pembangunan tersebut di atas lebih menekankan aspek perubahan sosial sebagai tujuan dari proses pembangunan. Perubahan sosial ini hanya bisa dicapai melalui proses yang matang dan terencana daru unit pemerintahan yang besar sampai yang kecil atau pemerintah pusat sampai ke tingkat desa. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda yang netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya.

c. Definisi Pengembangan Masyarakat

Alfitri (2011: 31) mendefinikan pengembangan masyarakat sebagai proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa aktivitas pengembangan masyarakat dilakukan berlangsung secara terus menerus sampai akhirnya masyarakat bisa mandiri tanpa terjadi ketergantungan dengan pihak luar. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan, sehingga kegiatan tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang dan tidak berhenti pada waktu dan kondisi tertentu.

Berbeda dengan definisi Zubaedi (2007:18) yang melihat pengembangan masyarakat sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki pilihan nyata menyangkut masa depannya. Definisi tersebut menekankan pada kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain pendekatan pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Zubaedi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan masyarakat sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Zubaedi, 2007, 19).

Selain sebagai sebuah metode dalam pemberdayaan masyarakat, Carry (1970) mendefinisi pengembangan masyarakat sebagai

program yang mencakup, (1) perencanaan; (2) memberikan dukungan untuk dapat menolong dirinya sendiri; (3) bantuan teknik mencakup tenaga pelaksana, peralatan, dan bantuan bahan makanan; (4) keahlian khusus yang diintegrasikan untuk membantu komunitas; (5) program dilaksanakan berdasarkan batasan wilayah atau area geografis. (Hasim dan Remiswal, 2009: 49). Lebih lanjut Carry (1970) menjelaskan bahwa pelaksanaan program pengembangan masyarakat pada umumnya menunjukkan bahwa program bersifat umum membutuhkan peningkatan penggunaan pelaksanaan khusus yang profesional dengan diorganisasikan berdasarkan tujuan tertentu dalam cakupan pelaksanaannya sehingga program dapat memberi motivasi dan kerjasama pada seluruh komunitas agar dapat mempelajari diri dan menemukan masalahnya. (Hasim dan Remiswal, 2009:50). Model pengembangan masyarakat mensyaratkan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang

luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan. Strategi dasar pengembangan masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat yaitu dengan mencari cara untuk dapat memotivasi warga masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. (Hikmat, 2006: 67). Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalam pengembangan itulah yang menjadi tujuan utama proses perubahan. Bila warga masyarakat penuh dengan kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif berarti tanda-tanda perubahan pun sudah tercapai.

d. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2009: 60) merupakan upaya pemerintah mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Suharto (2005: 60) mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan yaitu menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan

bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat menurut Suryadi (2006 : 56) dapat dilakukan dengan tiga hal, yaitu: (a) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan kesadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan, (b) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang.

Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat, dan (c) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan dengan memberikan bantuan uang, yang justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Di dalam konsep pembangunan masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri. Suryadi (2006: 61) mengemukakan bahwa aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Kartasmita (Jayadinata & Pramandika, 2006: 3) mengemukakan bahwa Pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang saling berkaitan, yaitu: (a) Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan smasyarakat desa, (b) Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya

saing, (c) Membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup karena lokasi perkampungan terpencil, seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong-royong harus diutamakan, dan (d) Mengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintahan desa harus mampu menampung aspirasi dan menggali aspirasi masyarakat

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pembangunan

Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor pendukung. Starman, (Kunarjo, 2002: 126) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa: (1) peranan pendamping, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) kemampuan kelompok sasaran.

a. Peranan pendamping

Program pembangunan merupakan suatu kebijakan untuk menemukan paradigma masyarakat lokal untuk memberdayakan masyarakat miskin. Pergeseran paradigma pembangunan dari manajemen *top down* ke *people centered development* dengan manajemen pengelolaan masyarakat lokal membutuhkan pendampingan dari orang lain untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program pembangunan peranan para pendamping menjadi sangat penting.

Starman (Kunarjo, 2002: 126) mengemukakan bahwa peranan pendamping dalam pengembangan kelompok sasaran antara lain (1) membantu kelompok sasaran untuk memperkuat dinamika intern dengan memantapkan aspek keorganisasian (2) membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan terdekat yang dapat dieksploitasi sebagai usaha produktif (3) sebagai penghubung antara kelompok sasaran dengan berbagai potensi yang dimanfaatkan dari luar.

b. Partisipasi masyarakat

Partisipasi sudah menjadi bahasa yang umum dan sangat dikenal sejak dulu, partisipasi tiba-tiba

menjadi sesuatu yang harus didorong. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja karena dana pemerintah terbatas jika dibandingkan dengan keinginan membangun.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, mau tidak mau harus melibatkan partisipasi aktif segenap masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan, mulai dari keinginan/kebutuhan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan pembangunan, menerima hasil pembangunan, pertanggung jawaban atas pembangunan.

Pengertian partisipasi masyarakat dalam Program PNPM adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai, termasuk didalamnya kegiatan seseorang atau kelompok untuk mendukung berhasilnya program sesuai dengan kemampuannya. Bentuk (tahap) partisipasi yang dikemukakan oleh Ndraha (2000: 26), sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Kemampuan kelompok sasaran

Dunn (2002: 162) mengemukakan bahwa "Kelompok sasaran (*target group*) adalah orang, masyarakat atau organisasi yang kepada mereka suatu kebijakan atau program diharapkan memberikan akibat". Masyarakat selaku kelompok sasaran diharapkan menjadi pihak yang menikmati hasil suatu program, harus ditentukan secara jelas guna memobilisasi sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat.

Kegiatan penentuan kelompok sasaran program dilakukan pada tahap perencanaan karena besarnya alokasi dana bantuan kepada kecamatan

didasarkan pada jumlah masyarakat penerima bantuan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan setelah melalui musyawarah tingkat kecamatan/kelurahan.

Implementasi program pembangunan kelompok sasaran adalah masyarakat yang bermukim di Kelurahan yaitu kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terbatas kemampuan serta aksesnya dalam mendapatkan pelayanan, prasarana dan permodalan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau menghadapi masalah khusus dan mendesak yang segera memerlukan penanganan dan bantuan.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pembangunan

Program pembangunan lahir dari adanya suatu kebijakan. Jadi berbicara mengenai program tentu akan membicarakan mengenai kebijakan yang mendasari lahirnya program tersebut. Peters (Tangkilisan, 2003: 22) mengemukakan bahwa “penyebab kegagalan implementasi kebijakan, meliputi: “(1) Kurangnya informasi, (2) isi (tujuan) kebijakan tidak jelas, (3) pelaksanaannya tidak memperoleh dukungan yang cukup, (4) pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas.” Sejalan dengan itu Bardach (Tarigan, 2007:25) menyatakan bahwa “Kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai, dan komitmen yang rendah dari pelaksana.”

Organisasi sebagai faktor determinan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (Tarigan, 2007: 26) mengisyaratkan “pentingnya memahami implementasi sebagai proses interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor lingkungan”. Jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Dalam hubungan ini, maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi antar pelaksana dan budaya yang dianut. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle (Tarigan, 2007: 26) yang menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pelaksananya”. Dari sisi pelaksana kebijakan didasarkan pada sumber daya yang dimiliki dengan segala perilakunya. Sumber daya dalam suatu organisasi meliputi kapasitas organisasi dan orang yang terlibat didalamnya, mutu dan jumlahnya, kewenangan yang dimiliki, dan budaya organisasi. Selain itu, apabila suatu kebijakan dilaksanakan lebih dari satu organisasi maka sumber daya organisasi juga meliputi kerjasama dan koordinasi.

Selain faktor isi kebijakan dan faktor organisasi, Grindle (Tarigan, 2007: 26) mengemukakan bahwa lingkungan merupakan faktor determinan

implementasi kebijakan yang harus dipahami, karena dalam elemen konteks implementasi bahwa dalam proses implementasi kebijakan terjadi proses interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor lingkungan dimana proses interaksi dan reaksi terjadi. Uraian tersebut menjelaskan bahwa faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan, harus dilihat dari pendekatan sistem. Hal ini sejalan dengan model dasar pendekatan sistem yang meliputi input, transformasi, output dan lingkungan. Selain itu organisasi berorientasi pada lingkungan karena organisasi merupakan salah satu sub-sistem dari suatu sistem yang lebih besar. Sehubungan dengan itu maka organisasi harus menjaga eksistensinya dengan cara selalu beradaptasi dengan lingkungannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian Tentang efektifitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga ini, penulis dapat menjelaskan beberapa poin penting dalam penelitian ini. Kebijakan ini merupakan program yang tujuannya RT harus memiliki peran penting dalam pembangunan, tidak hanya menerima dan menjalankan keputusan. Tentunya belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai tanggung jawab, Tugas, pokok, dan fungsi seperti yang dibutuhkan tingkat partisipasi dan tanggung jawab aktor pembangunan baik pemerintah, swasta ataupun masyarakat dalam mengimplementasikan program PBRT supaya target yang diharapkan dapat tercapai tidak hanya sebatas angan-angan, akan tetapi implementasi harus di tekankan sehingga kebijakan pemerintah tersebut mampu dipertanggung jawabkan dan keberhasilan program yang harus diutamakan. Untuk memaksimalkan PBRT harus dimulai dari partisipasi seperti rebug RT, gotong royong dan lain-lain.

Dalam pembahasan penulis dapat menjelaskan beberapa hal dari hasil analisis yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas PBRT yaitu, (1) Peranan Pendamping yang kurang sehingga menyebabkan terjadinya stagnan dalam implementasi Program sehingga terjadi ketidak sinkronan antara harapan dan kenyataan, ada beberapa pendamping yang ditugaskan untuk menjadi fasilitator program yang tergabung dalam Tenaga Sukarela Terdidik (TKST) dan Kader Pendampingan Masyarakat (KPM) mereka ditugaskan satu RT masing- masing satu kader pendamping, namun dalam berlangsung tidak berjalan maksimal. Perangkat RT berjalan sendiri tanpa pendampingan sehingga keefektifan program

tidak maksimal (2) Partisipasi masyarakat yang menjadi harapan keberlangsungan PBRT masih membutuhkan perhatian karena ketidak fahaman terhadap kebijakan PBRT menyebabkan masyarakat sebagai tujuan utama program masih terkesan kurang kompak sehingga membutuhkan banyak perhatian dan pemahaman, mengerti apa yang dimaksud dengan model Pembangunan Berbasis Rukun tetangga (3) Keterbatasan Sumber Daya seperti Sumber Daya Manusia yang masih tergolong minim menjadi bumerang untuk keberlangsungan PBRT. (4) Struktur Organisasi yang kurang memadai terlihat RT sebagai mitra kerja pemerintah diberikan tugas dan fungsi yang sangat terbatas dan tidak sesuai dengan perintah yang ada di dalam Perda dan panduan PBRT, para pihak pemangku kepentingan harus benar-benar menjalankan program sejalan dan tidak mengurangi dan menambah porsi, pemerintah selaku penentu kebijakan sudah membagi tugas sesuai lahan kerja masing-masing (5) Komitmen yang rendah dari pelaksana yaitu dari Inovasi PBRT dan model pembangunan Berbasis Rukun Tetangga banyak yang tidak sejalan seperti dana stimulan RT sebagai pendukung proses tidak berjalan maksimal. Banyak yang diberikan wewenang dalam pelaksanaan program seperti LSM, Perguruan tinggi dan swasta Tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan PBRT belum semua unsur dilibatkan terutama dari pihak LSM, swasta serta masyarakat dan terkesan pemerintah berjalan dalam lingkaran sendiri langsung ke RT.

Dari beberapa faktor di atas penulis mengalisa bahwa program pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tidak berjalan efektif seperti yang menjadi mimpi Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten percontohan dari program ini. Terlihat ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak efektifan seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas. Pemerintah selaku pemangku kepentingan memang harus serius dalam menjalankan kebijakan ini karena di inovasi dan Model PBRT menjelaskan beberapa keunggulan PBRT dibanding kebijakan lain yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

IV. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai indikator yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas program pembangunan berbasis rukun tetangga di kabupaten Sumbawa Barat dengan study kasus di kecamatan Taliwang, Brang Ene dan Maluk tidak efektif dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga adalah Program Unggulan dan program percontohan Kabupaten Sumbawa Barat yang mampu menjadikan kabupaten Sumbawa Barat menempati IPM tertinggi di NTB Pada tahun pertama pelaksanaan karena program ini langsung menyentuh kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk Masyarakat. Akan tetapi dari hasil temuan penulis saat meneliti yaitu PBRT Tidak berjalan maksimal seperti penjelasan berikut: pelaksanaan PBRT belum semua unsur dilibatkan terutama dari pihak LSM, swasta serta masyarakat dan terkesan pemerintah berjalan dalam lingkaran sendiri langsung ke RT.
2. Dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat dari program ini dilihat dari harapan dan kenyataan tidak sejalan, seperti dalam program ini rebug RT sudah tidak lagi aktif, insentif ketua RT tidak ada kejelasan sehingga terlihat sama seperti RT sebelum PBRT
3. Dana Stimulan tidak lagi menjadi prioritas yang mendukung kinerja RT, yang membuat para ketua RT dan masyarakat RT jenuh, karena dengan dukungan dana stimulan bisa menjadi peyemang terutama dalam gotong royong dan rapat-rapat RT
4. Program yang awalnya sangat di puji karena mampu merangkul masyarakat secara langsung, sekarang kesannya terabaikan, kelompok pendamping yang bentuk tidak jelas kerjanya.
5. Sasaran yang di tuju dalam PBRT sudah tepat akan tetapi fungsi dari sasaran dimaksud tidak maksimal sehingga menghambat keberlangsungan
6. Keterlibatan stakeholder tidak terlihat secara maksimal, sesuai dengan perda no 27 tahun 2008 yang mengatur tentang program tersebut alhusus berkaitan dengan siapa saja yang harus terlibat atau dilibatkan didalam implementasi program tersebut, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan HG ketua BDP desa seloto, bahwa yang terlibat didalam implementasi program tersebut hanya BPM PEMDES DAN BAPPEDA yang terlibat sedangkan stakeholder lainnya tidak dimaksimalkan perannya.
7. Pada tahun 2008 pemerintah kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan peringkat pertama dalam hal indeks pembangunan manusia se propinsi berkat program pembangunan berbasis rukun tetangga, namun sangat disayangkan pada periode kedua program tersebut tidak terimplementasi dengan baik dan maksimal sehingga program tersebut seakan hilang dari perhatian pemerintah kabupaten Sumbawa Barat.
8. Keterbatasan Sumber Daya yang membuat kurang efektifnya proses Seperti penentuan Ketua RT sebagai garda terdepan dalam Program PBRT tidak sesuai pada tempatnya. Banyak yang tidak menempuh pendidikan di tunjuk sebagai ketua RT, padahal pada dasarnya kebijakan ini di fokuskan untuk menjalankan pembangunan mulai dari RT,

dan beda dengan RT yang hanya numpang nama tanpa memperhatikan tingkat pendidikan dan ilmunya.

[20]. <http://kobarksb.com/?p=106#sthash.D0lBObtU.dpbs>

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Budiman, Arif, *Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- [2]. Campbell, JP, Dunnette, MD, Lawler, EE, & Weick, KE. *Managerial behavior, performance, and effectiveness*. New York: McGraw-Hill, (1970)
- [3]. Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002
- [4]. Hasim dan Remiswal. *Community Development Berbasis Ekosistem*. Jakarta: Diadit Media. (2009)
- [5]. Kartasasmita, Ginanjar, *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1997
- [6]. Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia. .
- [7]. Masniadi, R & Davd K., *Implementasi Kebijakan Fiskal: Pembiayaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) di Kabupaten Sumbawa Barat*, Universitas Mataram dan David Kaluge Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, 2011
- [8]. Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung., 2014.
- [9]. Mustofa, Sahrul *Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga*. Kerjasama Pemkab KSB dan LEGITIMID KSB.Taliwang. 2008
- [10]. Mustofa, Syahrul, *Menata Model Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)*, Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat Desa, 2010.
- [11]. Ndraha, Taqliziduhu., *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta. 1990
- [12]. Saladien, *Rancangan Penelitian Kualitatif Modul Metodologi Penelitian Kualitatif*, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember, 2006.
- [13]. Satori, Djam'an, dan Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013
- [14]. Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia. 2009
- [15]. Suryadi S. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Membangun Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional*. Sinergi: Jurnal Manajemen Kolaborasi. LATIN Bogor. 1 (2): 114. 2006
- [16]. Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- [17]. Tarigan, Robinson, 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- [18]. Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [19]. <http://www.sumbawabaratkab.go.id/v/pemerintahan/program-strategis/pbrrt-the-ksb-s-model.html>